HUKUM TATA NEGARA

LEGITIMASI KEDUDUKAN HUKUM KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM TATA PEMERINTAHAN

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

FERARA ANJA A'IDULLOH
NPM : 2274201001647

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2026

HUKUM TATA NEGARA

LEGITIMASI KEDUDUKAN HUKUM KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM TATA PEMERINTAHAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

FERARA ANJA A'IDULLOH

NPM : 2274201001647

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2026

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 31 Juli 2026

Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.	Humiati, S.H., M.Hum.

LEGITIMASI KEDUDUKAN HUKUM KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM TATA PEMERINTAHAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

FERARA ANJA A'IDULLOH
NPM : 2274201001647

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 31 Juli 2026

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,

Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 31 Juli 2026
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Humiati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan tersebut menempatkan Polri sebagai institusi negara dengan kewenangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pelaksanaan kewenangannya harus berlandaskan legitimasi hukum, prinsip negara hukum, asas legalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, kewenangan Polri harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, sesuai prosedur, tidak menyimpang dari tujuan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan. Besarnya kewenangan tersebut juga memerlukan pengawasan, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Adapun rumusan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kewenangan Polri berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 dan bagaimana kedudukan hukum Polri dalam sistem tata pemerintahan berdasarkan Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2014.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Polri berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada hukum, prinsip legalitas, proporsionalitas, kebutuhan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pertanggungjawaban. Kedudukan hukum Polri dalam sistem tata pemerintahan memiliki karakter khusus karena Polri merupakan institusi negara yang memiliki kewenangan di bidang keamanan dan penegakan hukum, tetapi dalam menjalankan kewenangan pemerintahan tertentu tetap harus tunduk pada prinsip administrasi pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, kewenangan Polri bukan merupakan kekuasaan yang mutlak, melainkan kewenangan hukum yang harus digunakan secara sah, terukur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Kewenangan Polri, Kedudukan Hukum, Administrasi Pemerintahan.

PERNYATAAN

ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 31 Juli 2026

Penulis,



FERARA ANJA A'IDULLOH

NPM. 2274201001647

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **"LEGITIMASI KEDUDUKAN HUKUM KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM TATA PEMERINTAHAN"** tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan maupun pengetahuan yang menyebabkan skripsi ini masih jauh dari harapan dan kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Muhammad Misdram, S.Kom., M.M., M.Kom.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Humiati, S.H., M.Hum, sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang dengan penuh kasih, sabar, tulus dan ikhlas memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan juga selalu memberikan arahan yang

baik kepada penulis agar menjadi pribadi yang cerdas.

4. Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan segenap ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
6. Ayah yang sangat saya dibanggakan karna telah berjuang hingga semua anak-anaknya bisa berkuliah walaupun ada cobaan yang datang silih berganti, ayah bisa membuktikan bahwa anak-anaknya berhasil berkuliah untuk meraih mimpi anak-anaknya menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Bunda yang selalu memberikan doa dan juga keridhoannya membuat kehidupan saya menjadi lancar barokah.
7. Adik-adik saya, Chealsy, Movik dan Azka yang sangat saya banggakan dan selalu menjadi motivasi untuk tetap semangat menjadi kakak yang bisa jadi panutan dan contoh bagi kalian.
8. Bapak H. Sulthon Aulia yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada kami generus LDII agar menjadi mubalig yang sarjana agar bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Mas Ahmad Maulana yang selalu mengarahkan hingga saya bisa berada di titik ini. Mas Gifa yang selalu mendorong agar menjadi pemuda yang berintelektual.
9. Keluarga Bani Tasripin yang selalu mendoakan dan memotivasi agar saya bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga.
10. Bapak-bapak pengurus daerah, desa, kelompok yang senantiasa meramut dan

menasehati saya agar sukses dunia akhiratnya, dan juga para muda-mudi Krampyangan yang tiada henti memberikan do'a dan motivasi serta memberikan tempat ternyaman dan hangat di lingkungan sekitar, sehingga saya bisa membanggakan keluarga.

11. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Pemuda LDII, LPA Kota Pasuruan yang menjadi wadah terbaik hingga mendapat banyak pengalaman, Senyum Anak Nusantara yang telah memberikan support kepada penulis. HMI yang telah memberikan banyak cerita di dalam masa berorganisasi. KNPI yang telah mengenalkan dengan berbagai macam organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan selalu mendukung serta memberikan semangat dalam menyelesaikan proposal skripsi ini sampai dengan tuntas.

Penulis beranggapan bahwa proposal skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.

Pasuruan, 31 Juli 2026
Penulis,

FERARA ANJA A'IDULLOH
NPM. 2274201001647

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK …….. i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ……..…….. ii

KATA PENGANTAR …….……. iii

DAFTAR ISI ……..….. vi

DAFTAR LAMPIRAN …….. ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ….……. 1

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah ……..……. 12

C. Tujuan Penelitian …… 12

D. Kegunaan Penelitian …… 13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Pengertian dan Sumber Legitimasi ……. 15

2. Teori Legitimasi ……. 18

3. Fungsi Legitimasi ……... 20

4. Bentuk-Bentuk Legitimasi ……. 22

B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kedudukan Hukum . 24

2. Unsur-Unsur Kedudukan Hukum ……... 26

3. Teori Kedudukan Hukum …….. 29

4. Pentingnya Kedudukan Hukum di Indonesia ……. 30

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian dan Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia ……. 32

2. Tugas Pokok Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia ……. 34

3. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia ….. 38

4. Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia ……. 39

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Tata Pemerintahan

1. Pengertian Sistem Tata Pemerintahan …….. 41

2. Jenis Sistem Tata Pemerintahan …… 43

3. Sistem Tata Pemerintahan di Indonesia …… 44

4. Perbedaan Pemerintah dan Pemerintahan …… 45

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian ……..…… 47

B. Ruang Lingkup Penelitian ……..…… 48

C. Jenis dan Sumber Data ……..…… 49

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum …… 52

E. Teknik Analisis Bahan Hukum ……. 53

BAB IV : LEGITIMASI KEDUDUKAN HUKUM KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM TATA PEMERINTAHAN

A. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia …… 54

B. Kedudukan Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Tata Pemerintahan Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ……. 74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ……... 95

B. Saran ……. 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi